

204-08-039

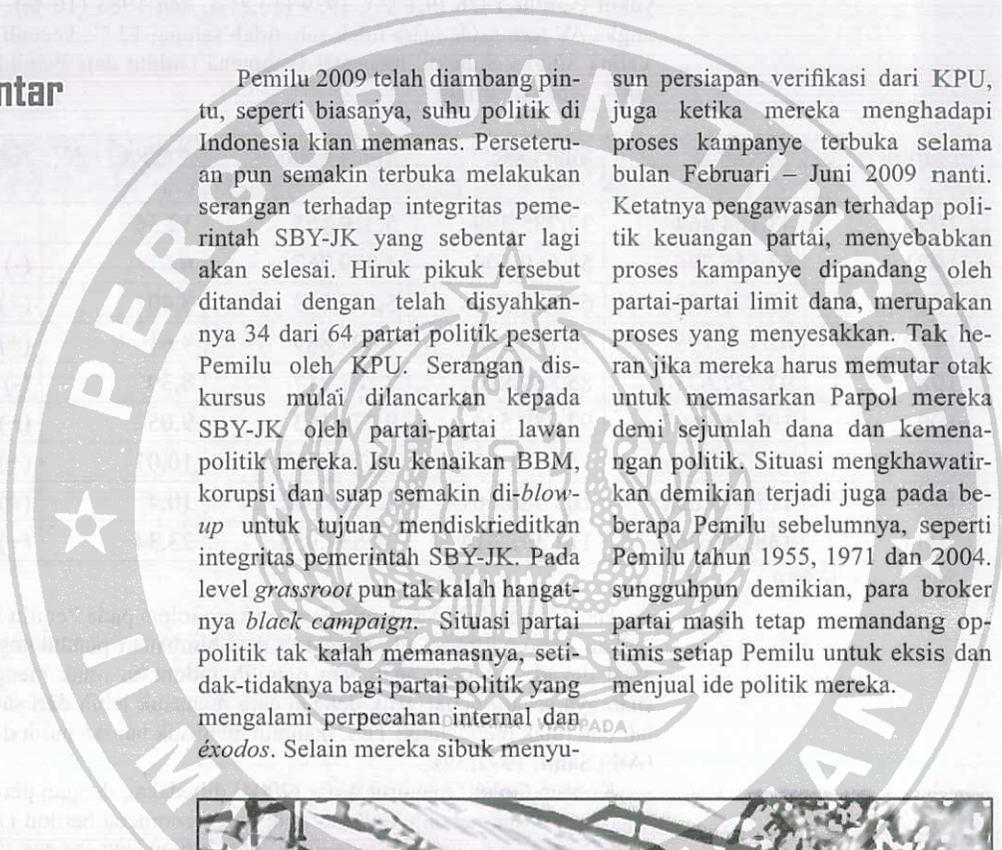
Membaca Gerakan Golput Dalam Pemilu 2009

Oleh **Munawar Ahmad**
Dosen Sosiologi Agama, Fak. Ushuluddin, UIN Sunan
Kalijaga, Yogyakarta

A. Pengantar

Pemilu 2009 telah diambang pintu, seperti biasanya, suhu politik di Indonesia kian memanas. Perseteruan pun semakin terbuka melakukan serangan terhadap integritas pemerintah SBY-JK yang sebentar lagi akan selesai. Hiruk pikuk tersebut ditandai dengan telah disyahkannya 34 dari 64 partai politik peserta Pemilu oleh KPU. Serangan diskursus mulai dilancarkan kepada SBY-JK oleh partai-partai lawan politik mereka. Isu kenaikan BBM, korupsi dan suap semakin di-blow-up untuk tujuan mendiskreditkan integritas pemerintah SBY-JK. Pada level *grassroot* pun tak kalah hangatnya *black campaign*. Situasi partai politik tak kalah memanasnya, setidak-tidaknya bagi partai politik yang mengalami perpecahan internal dan *exodus*. Selain mereka sibuk menyu-

sun persiapan verifikasi dari KPU, juga ketika mereka menghadapi proses kampanye terbuka selama bulan Februari – Juni 2009 nanti. Ketatnya pengawasan terhadap politik keuangan partai, menyebabkan proses kampanye dipandang oleh partai-partai limit dana, merupakan proses yang menyesakkan. Tak heran jika mereka harus memutar otak untuk memasarkan Parpol mereka demi sejumlah dana dan kemenangan politik. Situasi mengkhawatirkan demikian terjadi juga pada beberapa Pemilu sebelumnya, seperti Pemilu tahun 1955, 1971 dan 2004. sungguhpun demikian, para broker partai masih tetap memandang optimis setiap Pemilu untuk eksis dan menjual ide politik mereka.



B. Fenomena Absentia Voter (Golput) dalam Pemilu di Indonesia

Asfar (2004) menuliskan pendapatnya jika angka AV di Indonesia masih tergolong rendah, dibanding negara-negara lain, seperti Itali, Kuwait, Amerika Serikat, Malawi, angka AV di atas 60%. Jumlah AV di Indonesia hingga Pemilu 2004, masih menunjukkan tingkat yang kecil, yakni sekitar 10%. Meskipun demikian, angka AV tersebut dipandang cukup merisaukan oleh pemerintah, karena AV ditafsirkan sebagai : (1) bentuk loyalitas atau kepercayaan pada sistem politik yang ada, sehingga ketidakhadiran dipandang sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada sistem politik atau rezim yang ada. (2) Adanya kecenderungan naiknya angka AV pada beberapa Pemilu di beberapa negara. Di Itali misalnya, sejak Pemilu 1976, 1979, 1983 angka AV naik rata-rata 4%, yakni Pemilu 1976 (9,1 %), 1979 (13,2%), dan 1983 (16 %). Di Indonesia, angka AV termasuk suara tidak sah, tidak sampai 12 %, kecuali Pemilu 2004. Valina Singka Subekti, mencatat fenomena Golput dari Pemilu 1955 hingga 2004, sebagai berikut:

Pemilu	Terdaftar	Suara sah	Tidak hadir	Angka AV (%)	Kenaikan
1955	43.104.464	37.785.299	5.319.165	12,34	
1971	58.556.776	54.669.509	3.889.267	6,67	(-) 5,67
1977	69.871.092	63.998.344	5.872.748	8,40	(+)1,73
1982	82.134.195	75.126.306	7.007.889	9,61	(+)1,21
1987	93.737.633	85.869.816	7.867.817	8,39	(-) 0,22
1992	107.565.697	97.789.534	9.776.163	9,05	(+) 0,26
1997	124.740.987	112.991.150	11.749.837	10,07	(+) 1,02
1999	117.815.053	105.786.661	12.028.392	10,4	(+) 0,34
2004	148.000.369	113.462.414	34.537.955	23,34	(+)13,30

Sumber : Asfar (2004:5)

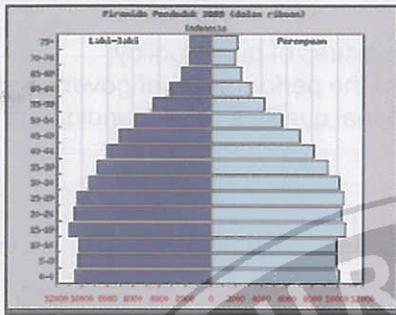
Hasil kajian Arbi Sanit terhadap gerakan Golput pada Pemilu 1977 menyimpulkan dimungkinkan ada pengaruh dari himbuan pendukung Golkar pada awal dekade 1970-an agar para pemilih Indonesia tidak menggunakan hak suaranya secara benar, baik dengan cara menusuk lebih dari satu tanda gambar dan tidak mendatangi TPS, maupun menusuk bagian putih dari kartu suara (Arbi Sanit, 1992:39).

Konsep Golput menurut Asfar (2004) dibedakan dengan perilaku *non-voting*. Golput digunakan untuk merujuk pada fenomena berikut (1) Orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes, (2) Orang yang menghadiri tempat pemilihan suara tetapi tidak menggunakan hak pilihnya secara benar, dan (3). Orang yang menggunakan hak pilihnya namun dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Sementara *Non-voting* ditujukan pada perilaku tidak memilih karena tidak adanya motivasi untuk memilih. Namun kedua istilah tersebut menunjuk pada hasil perbuatan yang sama, yakni hak pilihnya tidak digunakan dengan benar.

Pemilu 2009 akan memperebutkan suara dari seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2009 kelak. Berdasarkan prediksi statistik dari laju pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2007 – 2010, yakni sebagai berikut :

2007	2008	2009	2010
224,904.9	227,779.1	230,632.7	233,477.4

Adapun komposisi penduduk Indonesia pada tahun 2009 ditunjukkan dalam bentuk piramida penduduk sebagai berikut:



Komposisi penduduk piramidal tersebut, menunjukkan gejala bahwa penduduk kelompok usia muda menjadi penduduk terbanyak dibanding kelompok usia tua dan anak-anak. Dalam konteks Pemilu, penduduk usia muda (15 – 45) menjadi target suara potensial dalam Pemilu 2009. Komposisi tersebut berpotensi sebagai kelompok potensial untuk menjadi *absentia voters* (Golput).

Fenomena *Absentia Voters* (Golput) dalam Pilkada akhir-akhir ini menunjukkan gejala yang signifikan dengan mewabahnya kekecewaan rakyat terhadap partai pilihan pemenang Pemilu. Semenjak Pilpres 2004, angka Golput mampu menembus 30 % sebanding dengan suara pemenang ke dua, yakni Mega-Hasyim (39.38%). Beberapa Pilkada juga menunjukkan gejala yang sama. Pemenang sesungguhnya dari putaran pertama Pilkada Jawa Timur ternyata bukan pasangan Sukarwo dan Syaifullah Yusuf yang diusung oleh partai Demokrat dan PAN. Secara statistik, pemenangnya justru kelompok golongan putih atau Golput alias mereka yang memilih untuk tidak memilih. Jumlahnya dalam kisaran angka 40 persen.

Berdasarkan hitungan berbagai versi *quick count* yang selama ini telah terbukti tidak terlalu meleset dari hitungan suara faktual KPUD, pasangan Karsa (Sukarwo-Syaifullah Yusuf) meraih antara 27-29 persen. Di belakangnya pasangan Kaji (Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono) yang diusung PPP dan sejumlah partai kecil dengan 23-25 persen. Tiga pasang kandidat lain yang diusung partai 'besar' yang selama ini mengklaim punya basis massa di Jawa Timur (PDIP, Golkar, dan PKB), justru kalah.

Kekalahan partai 'besar' tak cuma terjadi di Pilkada Jatim saja. Ini merupakan fenomena menarik yang layak dikaji tersendiri oleh internal Parpol, terutama bila dikaitkan dengan persiapan Pemilu 2009. Selain di Jatim, keunggulan 'partai Golput' terjadi di Pilkada Sumut (42 persen mengalahkan kandidat pemenang yang meraih 29 persen suara), di Jateng (45 persen berbanding 24 persen), di Jabar (32 persen berbanding 25 persen). Di Jakarta, angka Golput 34 persen, nyaris sama dengan perolehan suara Fauzi Bowo-Prijanto, yang meraih 36 persen atau 55 persen dari sisa suara sah (66 persen). Angka persentase kandidat pemenang dalam catatan ini lebih kecil dari hasil KPUD karena dihitung dari jumlah total pemilih, bukan dari total suara sah.

Tetapi UU atau aturan hukum kita tidak mengakui keberadaan 'partai Golput' sehingga secara legalitas tetap sah sekalipun jumlah suara

pemenang jauh di bawah Golput. Kalau pun harus diulang menjadi dua putaran, seperti kemungkinan besar untuk Pilkada Jatim, itu karena jumlah suara pemenang tak sampai 30 persen dari total suara sah. Dengan kata lain, lagi-lagi tak ada urusannya dengan Golput.

Praktik demokrasi modern seperti ini berbeda dengan praktik demokrasi tradisional ala pemilihan kepala desa pada jaman dahulu. Di sana selalu tersedia sebuah kotak kosong untuk menampung mereka yang tak mau memilih kandidat, dengan berbagai alasan apapun. Bila isi kotak ini lebih banyak dari perolehan suara kandidat, maka pemilihan akan batal atau harus diulang.

Kembali ke praktik demokrasi semacam itu tentu akan memakan tenaga, waktu, biaya yang besar dan konon pula tidak sesuai jaman. Apalagi sebagian besar dari kita terlanjur memahami demokrasi yang benar dan gagah adalah demokrasi ala negara Barat, lebih khusus lagi gaya Amerika Serikat. Tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi bangsa, fenomena besarnya Golput layak mendapat perhatian bersama. Apalagi angka AV saat ini justru terjadi di wilayah Jawa yang sebagian warganya diasumsikan lebih berpendidikan dan memiliki tingkat melek politik yang tinggi.

Berkaitan dengan AV, ada beberapa teori yang menjelaskan mengapa hal angka AV tinggi, antara lain :

1. *A voter may choose a candidate on the basis of one or more of the following considerations: (a) orientations on specific issues of public policy; (b) general assessments of the performance of government; and (c) evaluations of the personal qualities of the candidates.*

2. *These orientations and evaluations in turn are influenced by two more general factors: (1) basic loyalty to or preference for a particular political party; and (2) general ideological orientations and dispositions.*

Mekanisme tersebut dijelaskan dalam gambar di bawah ini.

Proses referensi-preferensial Voter

- (a) orientations on specific issues of public policy;
- (b) general assessments of the performance of government; and
- (c) evaluations of the personal qualities of the candidates.
- (d) Elite referenced



- basic loyalty to or preference for a particular political party;
- general ideological orientations and dispositions.

C. Political Disappointment

Kekecewaan politik (*political disappointed*) merupakan dorongan terkuat sikap AV terjadi. Kekecewaan politik terjadi karena beberapa persoalan, yakni : (1) Kegagalan birokrasi memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Masyarakat menaruh harapan terhadap berjalannya pelayanan publik pemerintah bagi pengelolaan hajatorangbanyak. Misal, ketidajelasan penyelesaian Bencana Lumpur Lapindo, tidak dipungkiri hal tersebut dapat memicu tingginya angka AV di daerah tersebut. (2) Gerakan AV dari para elit yang kecewa terhadap situasi perpolitikan saat ini. Indikasi tersebut dapat diikuti dari kasus Pemilu 1977, dimana Golkar pernah mengajak para konstituennya untuk Golput, karena ada kekhawatiran suara PPP angka meningkat mengalahkan Golkar. Saat itu gerakan Golput dianggap sebagai gerakan pengembosan suara oleh Golkar terhadap PPP. Pada Pemilu tahun 1999, gerakan AV juga terlihat jelas, saat itu, gerakan AV diartikan

sebagai bentuk pembangkangan terhadap gerakan elit pusat. Kemudian gerakan tersebut semakin menguat pada Pemilu tahun 2004. Ada gerakan elit yang menganjurkan AV sebagai bentuk perlawanan terhadap proses demokrasi elitis. Gerakan ini dimotori oleh Amin Rais dan Gus Dur. (3). Munculnya sikap apatis politik dari rakyat akibat proses reformasi yang tak kunjung usai. Janji-janji politik yang pernah disampaikan para elit pun tak kunjung terlaksana dengan segera, ditunjang dengan pandangan yang mencolok jika pergumulan kekuasaan hanya bergulir pada sege-lintir kelompok saja. Situasi tersebut semakin menyiratkan kemungkinan angka AV tinggi di Indonesia. Kini, ada kecenderungan jika gerakan Golput dipandang sebagai gerakan yang menghendaki kebaikan dan perubahan dalam politik. (4). Rasionalitas rakyat terhadap perilaku politik semakin tinggi, sehingga mereka kini akan berhitung tentang keuntungan

riil yang didapat jika berafiliasi terhadap salah satu partai politik. Meskipun pada akhirnya, rakyat hanya mempermainkan partai politik dan tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik ketika Pemilu 2009 nanti.

Political disappointment merupakan respon individual yang menyebar menjadi perasaan kolektif atas suatu kinerja pemerintah yang buruk. Situasi tersebut akan mampu mempengaruhi relasi rakyat-negara apabila tingkat *disappointment* rakyat sudah tinggi. Sebuah sumber menyebutkan hubungan tersebut, yakni:

"Disappointment is a subjective response related to the anticipated rewards. The psychological results of disappointment vary greatly among individuals; while some recover quickly, others mire in frustration or blame or become depressed".

Political disappointment merupakan persepsi yang dirasakan oleh rakyat terhadap situasi politik yang terjadi. Pengaruh *political disappointment* tersebut bagi karakter rakyat Indonesia akan signifikan terhadap peningkatan angka AV apabila: (1) Tercerabutnya kekharismaan pemimpin lokal yang hidup bersama rakyat. Sebagaimana karakter budaya politik rakyat Indonesia yang parokhial, peran pemimpin kharisma, baik berbasis pada budaya, agama maupun lokalitas, menjadi kekuatan besar mobilisasi politik. Loyalitas rakyat terhadap pemimpin lokal yang kharismatik, lebih tinggi dibandingkan loyalitas mereka kepada elit politik. (2) Tercerabutnya lembaga pengawal demokrasi yang ideal dari panggung politik. Lembaga pengawal demokrasi ini antara lain: pers, LSM, kelompok

oposisi dan para intelektual, telah kehilangan orientasi nilai dalam mengawal demokrasi itu sendiri. Adanya kecenderungan jika beberapa pers, LSM telah menunjukkan keberpihakan mereka terhadap kepentingan politik sehingga advokasi-advokasi yang mereka lakukan, justru membawa rakyat kepada konflik yang berkepanjangan. (3) Hilangnya harapan hidup rakyat akibat tekanan dan ketidakadilan yang lama hinggap dalam kenyataan hidup mereka sehari-hari. Sulitnya mencari pekerjaan, mahalnya harga sembako, sulitnya mendapatkan minyak tanah, pupuk, serta lambannya pemerintah memberi bantuan kepada korban bencana alam, merupakan situasi yang menghimpit rakyat untuk berputus asa dan apatis terhadap negara.

Kini, rakyat Indonesia sedang mengalami 3 situasi penguat lahirnya *political disappointment*. Walhasil, kenyataan tersebut dipastikan akan berdampak terhadap peningkatan angka AV pada Pemilu 2009. situasi ini juga telah dipahami oleh para ahli strategi politik dari partai-partai politik. Mereka akan berusaha mengambil keuntungan dalam situasi demikian, termasuk akan memanfaatkan AV menjadi bagian untuk meraup suara dengan cara mengembosi suara lawan. Mereka berusaha membina kepastian konstituen-internal. Seiring dengan itu, mereka juga melakukan kampanye Golput sebagai upaya mengembosi suara partai lain. Menjelang tahun 2009, situasi perpolitik Indonesia sedang menunjukkan gejala perang dingin. Saling mengintip kelemahan partai lain sekaligus mencuri perhatian konstituen dari partai lain.

Akhirnya, seluruh gejala di atas semakin menyudutkan Indonesia pada defisiensi demokrasi, gejala tersebut memiliki ciri sebagai berikut:

- (1) Negara terjebak dalam situasi transisi permanen, sehingga tidak punya kemampuan untuk mengelola demokrasi ke arah yang efektif, tetapi demokrasi yang dikelola tidak dapat meminimalisir kontradiksi dan memperparah krisis multidimensi Indonesia.
- (2) Tingginya proyeksi Golput pada Pemilu 2009 semakin mengukuhkan arah dan prospek demokrasi di Indonesia adalah demokrasi elitis. Dimana para elit masih mendominasi kontrol politik nasional. Golput merupakan tantangan partai politik sekaligus strategi partai politik untuk (1). mensterilisasi vote dari konstituen fanatiknya dan (2). mengembosi (*swing voter*) lawan partainya. Hal tersebut dilakukan dengan cara *black campaign* dan *absentia voting campaign*
- (3) Prediksi akhir hanya akan mengulang sukses Pemilu 1999 dan 2004, yakni terpilih lagi 3-5 partai kuat di atas *electoral threshold* (Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKB). Hal tersebut karena partai-partai tersebut memiliki sumber daya partai yang memadai (elit, kapital, *networking* dan *lobbying*)



D. Upaya mereduksi angka AV pada Pemilu 2009

Apakah mungkin mereduksi angka AV dalam Pemilu 2009 hingga menjadi nol? Jawabannya tentu tidak, kecuali seperti situasi perpolitikan di negara-negara yang memiliki hukum wajib mencoblos, seperti di Uni Sovyet, Albania, Bulgaria, Polandia, Rumania, Czechoslovakia, Guinea, dan Australia. Pada negara-negara tersebut angka AV kecil karena ada hukum yang mewajibkan mereka untuk mencoblos. Namun, apakah pemaksaan tersebut juga akan diterapkan di Indonesia? sampai saat ini belum ada tanda-tanda yang kuat akan upaya penegakan hukum wajib memilih di Indonesia.

Seperti dijelaskan di atas, jika perilaku AV tersebut berkorelasi dengan faktor eksternal dan internal rakyat itu sendiri. Jadi, jika ingin mereduksi angka AV, maka syarat yang harus ditempuh oleh negara maupun partai politik adalah mereduksi *political dis-appointed* rakyat terlebih dahulu. Ini hanya prediksi teoritis saja yang harus dibuktikan dalam sebuah survei, karena dari data yang ditemukan angka AV sangat tinggi terjadi pada Pemilu di negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris. Pada dua negara tersebut angka kehadiran pemilih di TPS sangat kecil yakni 20 %.

Walaupun demikian, berpijak pada teori di atas tadi, ada yang dapat dilakukan oleh negara untuk mereduksi angka AV tersebut. Upaya tersebut didasarkan pada kesadaran akan karakter perilaku parokhial dari rakyat Indonesia. Upaya yang dapat ditempuh, yakni (1) Membenahi jaringan komunikasi politik dengan melibatkan peran simbol kharismatik lokal. (2) Mengedepankan asas nasionalisma dan persaudaraan sebagai basis komunikasi, (3) Menfungsikan lembaga komunikasi publik sebagai media yang kredibel memberikan informasi politik yang cerdas, memberikan arahan tentang pentingnya nasionalisma sebagai landasan perpolitikan di Indonesia.

Namun, seberapa intensifnya gerakan meredam angka AV, toh tetap

tidak akan mereduksi hingga menjadi nol. Apalagi, kini sudah ada gejala *re-meaning* terhadap kata "Golput" sebagai kelompok yang bersih, paham politik, tidak emosional dan lebih ningrat, di tengah hiruk-pikuk dinamika politik yang kanibalis. Gerakan ini diprediksikan akan terus ada dalam sejarah Pemilu di negara-negara, akan tetapi persoalannya apakah gerakan tersebut akan mengganggu arah dinamika politik menuju satu tujuan yang pasti, yakni kesejahteraan bersama ataukah justru membelokkan dinamika politik ke arah yang destruktif. Inilah pertanyaan mendasar bagi negara mempedulikan angka AV ini. Dalam sejarah Pemilu Amerika saja membuktikan jika tingginya angka AV tidak ada korelasinya dengan dengan cita-cita politik, sejauh sistem perpolitikan sudah tertata dengan mapan. Akan tetapi, keadaan tersebut akan berbalik apabila sistem perpolitikannya belum mapan, suara rakyat akan menentukan dinamika perpolitikan suatu bangsa. *vox populi vox Dei*

Simpulan

Situasi Defisiensi Demokrasi masih bertahan hampir dua dekade, mulai tahun 1980 hingga saat ini. Dalam kajian ini dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang menyebabkan defisiensi tersebut, yakni (1). *Bottle Neck Communication* (BNC) menjadi penyebab tingginya potensi Golput. (2). Kekuatan *political simula-cra* yang menyesatkan voter, (3). Ulah politisi rabun ayam yang hanya memikirkan bagaimana caranya tetap bertahan dalam kekuasaan. Dan (4). Keterjebakan pemerintah dalam situasi reformasi permanen, sehingga sulit untuk mengarahkan sejarah demokrasi di Indonesia ke arah demokrasi yang berkeadilan.